



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 6 Tahun 2024 Page 5893-5907

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pendapatan Nasional dalam Tinjauan Ekonomi Syariah

Desi Andriani^{1✉}, Rahmi Vivri Masri², Muhammad Albahi³

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email: desiandrianipasca@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Dari sudut pandang ekonomi Islam, pendapatan nasional adalah metrik penting untuk mengevaluasi keadaan ekonomi makro suatu negara. Metode alternatif untuk menentukan dan mengalokasikan pendapatan nasional yang sering tidak terwakili secara adil oleh metode tradisional seperti PDB dan PNB adalah pendekatan ekonomi Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki alat-alat yang digunakan dalam ekonomi Islam untuk meningkatkan kesejahteraan dan untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam perhitungan pendapatan nasional. Metode studi literatur digunakan dalam penelitian ini. Temuan menunjukkan bahwa dengan mempertimbangkan keadilan sosial, distribusi yang adil, dan keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual, pendekatan ekonomi Islam memberikan kerangka kerja yang lebih menyeluruh. Alat-alat seperti wakaf, sedekah, infak, dan zakat sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan dan mencapai distribusi kekayaan yang lebih merata. Perhitungan pendapatan nasional yang lebih komprehensif sangat terbantu oleh pendekatan ekonomi Islam. Strategi ini mengatasi kelemahan metode tradisional dan memperkenalkan kesejahteraan ekonomi yang sejalan dengan norma-norma syariah dengan memberikan penekanan kuat pada keadilan sosial dan prinsip falah.

Kata Kunci: *Ekonomi Islam, Konsep, Pendapatan Nasional*

Abstract

From an Islamic economic standpoint, national income is a crucial metric for evaluating the macroeconomic circumstances of a nation. An alternate method of determining and allocating national revenue that is frequently not fairly represented by traditional methods like GDP and GNP is the Islamic economic approach. The purpose of this study is to investigate the tools utilized in Islamic economics to improve welfare and to comprehend how sharia principles are applied in the computation of national income. The literature study method is used in this investigation. The findings demonstrate that by taking into account social justice, equitable distribution, and striking a balance between material and spiritual requirements, the Islamic economic approach provides a more thorough framework. Tools like waqf, sadaqah, infaq, and zakat are crucial for enhancing welfare and attaining a more equitable distribution of wealth. A more comprehensive computation of national income is greatly aided by the Islamic economic approach. This strategy overcomes the drawbacks of traditional methods and introduces economic welfare in line with sharia norms by placing a strong emphasis on social fairness and the falah principle.

Keyword: Islamic economics, concept, national income.

PENDAHULUAN

Ekonomi Islam telah berkembang sejak abad ke-7 Masehi. Gagasan tentang ekonomi Islam muncul untuk mengatasi berbagai dinamika persoalan ekonomi. Dalam hal ini, negara memainkan peran utama dalam mengelola perekonomian. Kebijakan pemerintah yang bijaksana mampu mencegah krisis ekonomi, memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, serta mendistribusikan pendapatan (Virsa et al., 2024). Pendapatan nasional merupakan elemen esensial dalam analisis makroekonomi yang mencerminkan performa ekonomi suatu negara secara keseluruhan. Dalam paradigma ekonomi konvensional, pendapatan nasional sering diukur melalui Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Nasional Bruto (PNB), yang memberikan gambaran kuantitatif mengenai kesejahteraan ekonomi. Misalnya, teori Keynesian yang menyatakan bahwa peningkatan pendapatan nasional dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui mekanisme permintaan agregat. Menurut Keynes, pertumbuhan ekonomi tercermin dari peningkatan pendapatan nasional, diperlukan peningkatan permintaan konsumsi, permintaan pengeluaran pemerintah, permintaan investasi, serta permintaan ekspor dan impor (Azwar, 2016). Meskipun demikian, pendekatan ini kerap dikritik karena mengabaikan aspek distribusi dan keadilan sosial, yang menjadi perhatian utama dalam perekonomian yang adil dan inklusif.

Ekonomi syariah hadir sebagai alternatif yang menawarkan kerangka konseptual dan normatif berbeda dalam memahami pendapatan nasional. Berlandaskan pada prinsip

keadilan distribusi (*al-'adl*) dan keseimbangan (*al-tawazun*), ekonomi syariah mengutamakan pemerataan hasil ekonomi, sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Chapra, dalam bukunya, menjelaskan tentang aktualisasi konsep *falah* dan *hayatan thoyyibah*, yang menjadi inti tantangan ekonomi bagi negara-negara Muslim. Kedua konsep ini berasal dari ajaran Islam yang seharusnya diterapkan dalam kehidupan umat Muslim guna mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Implementasi ini memerlukan peningkatan moral, persaudaraan, serta keadilan sosio-ekonomi, dengan pemanfaatan sumber daya yang terbatas untuk mengurangi kemiskinan, memenuhi kebutuhan, dan menghindari riba (Inayati, 2013). Oleh karena itu, pendekatan ekonomi syariah menekankan pentingnya mekanisme redistribusi pendapatan, seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf, dan pajak yang berperan sebagai instrumen dalam menjaga keseimbangan ekonomi dan mengurangi kesenjangan sosial.

Dalam beberapa dekade terakhir, kajian tentang implikasi ekonomi syariah terhadap pendapatan nasional terus berkembang. Tidak luput dari perhatian bahwa negara-negara di segala penjuru dunia menerima dampak dari pasca pandemi Covid-19. *Annual Islamic Finance Conference* (AIFC) ke-5 yang diadakan tahun 2021 memberikan kesimpulan bahwa keuangan syariah memainkan peran penting dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional pasca-pandemi serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui penerapan prinsip-prinsip keuangan syariah, seperti *risk-sharing* dan penggunaan instrumen sosial Islam (zakat, wakaf, infaq), untuk mendukung sektor UMKM dan kelompok masyarakat rentan (Badan Kebijakan Fiskal, 2021).

Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan pendapatan nasional, yang berfungsi sebagai indikator penting dalam mengevaluasi keadaan ekonomi makro suatu negara. Studi empiris yang dilakukan oleh Jawad & Christian (2019), menunjukkan bahwa perbankan syariah memperkaya sistem keuangan tanpa menimbulkan gangguan terhadap bank konvensional, memperkuat pasar keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Studi ini menyoroti bagaimana instrumen keuangan Islam dapat menghasilkan efisiensi makroekonomi. Fakta empiris lainnya ditemukan oleh Ben Jedidia & Guerbouj (2021), yang meneliti bagaimana zakat, sebuah prinsip dasar ekonomi Islam, memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dengan merangsang konsumsi dan investasi termasuk pengeluaran pemerintah. Temuan tersebut menggarisbawahi peran zakat dalam kebijakan ekonomi, menekankan perlunya sistem pengumpulan dan penyaluran yang efisien untuk memaksimalkan dampak pertumbuhannya.

Dengan mempertimbangkan latar belakang teoritis dan empiris tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep pendapatan nasional dari sudut pandang ekonomi

Islam. Fokus utama adalah memahami bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat memengaruhi perhitungan dan distribusi pendapatan nasional, serta faktor-faktor yang memengaruhi pendapatan nasional dalam kerangka ekonomi syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan secara kualitatif. Membaca, mencatat, mengolah, dan mengumpulkan data dari literatur merupakan beberapa tugas yang termasuk dalam penelitian kepustakaan. (Zed, 2008). Secondary data was gathered from a variety of sources, including books, scholarly journals, and other pertinent electronic sites. Research arguments are developed using a variety of Islamic economics literature, both traditional and modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pengertian Pendapatan Nasional

Konsep pendapatan nasional awalnya diusulkan oleh Sir William Petty dari Inggris yang mencoba mengukur pendapatan nasional negaranya (Inggris) pada tahun 1665. Dalam perhitungannya, ia menggunakan asumsi bahwa pendapatan nasional adalah jumlah biaya hidup (konsumsi) selama setahun. Namun, para ekonom modern tidak setuju dengan sudut pandang ini karena mereka percaya bahwa ada faktor-faktor lain yang menentukan pendapatan nasional di luar konsumsi. Mereka berpendapat bahwa Produk Nasional Bruto (PNB), yang merupakan seluruh jumlah barang dan jasa yang diproduksi setiap tahun oleh negara yang bersangkutan sebagaimana ditentukan oleh harga pasar domestik, adalah instrumen utama untuk mengukur aktivitas ekonomi.

Nilai barang dan jasa yang diproduksi suatu negara dapat dipahami sebagai pendapatan nasionalnya (Sukirno). Huruf kapital P dan N memiliki arti yang berbeda. Pendapatan nasional adalah jumlah total uang yang diperoleh oleh komponen-komponen produksi yang digunakan untuk menciptakan barang dan jasa dalam satu tahun tertentu. Pendapatan nasional bruto dan pendapatan domestik bruto adalah dua cara yang digunakan untuk menghitung pendapatan nasional. (Sukirno, 2008).

Produk Nasional Bruto (PNB), juga disebut Pendapatan Nasional Bruto (PNB), adalah nilai barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara oleh faktor-faktor produksi yang dimiliki dalam negeri, termasuk nilai produksi yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi yang digunakan di luar negeri. Produk nasional bruto tidak termasuk produksi yang dimiliki oleh penduduk atau bisnis asing yang digunakan di negara tersebut. (Naf'an, 2014).

Nilai pasar semua barang jadi dan jasa yang diproduksi di suatu negara selama periode waktu tertentu, termasuk elemen produksi yang dimiliki oleh penduduk dalam negeri dan luar negeri yang melakukan produksi di sana, dikenal sebagai produk domestik bruto (PDB), juga disebut sebagai pendapatan domestik bruto (PDB) (Mankiw, 2006).

Ada tiga metode untuk menghitung pendapatan negara (Hasan, 2023):

- 1) Pendekatan pendapatan adalah metode untuk mencari tahu berapa banyak uang yang dihasilkan rumah tangga di suatu negara selama periode waktu tertentu, termasuk uang dari upah, sewa, bunga, dan laba yang diberikan kepada bisnis sebagai pembayaran atas input produksi yang mereka gunakan. Perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan (Purnamasari, 2024):

$$Y = R + W + I + P$$

- 2) Pendekatan produksi, Nilai semua barang yang diproduksi oleh sektor pertambangan, industri, pertanian, jasa, dan perdagangan suatu negara selama periode waktu tertentu dapat ditentukan menggunakan pendekatan produksi. Metode ini menghitung nilai barang berdasarkan nilai barang dan jasa yang telah selesai, bukan bahan mentah atau komoditas setengah jadi. (Asyari Hasan, 2023). Perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi:

$$PDB/Y = \{(Q1 + Q2) + (Q2 \cdot P2) + \dots (Qn + Pn)\}$$

- 3) Pendekatan pengeluaran: Ini adalah teknik untuk menghitung total biaya pembelian tenaga kerja dan barang yang dikirim ke suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan biaya yang dikeluarkan oleh empat pelaku ekonomi: rumah tangga, pemerintah, investasi, dan selisih antara nilai impor dan ekspor. (Purnamasari, 2024).

Perhitungan pendapatan nasional dengan cara pengeluaran:

$$Y = C + I + G + (X-M)$$

Konsep Pendapatan Nasional

Ada enam macam pengertian atau Konsep pendapatan nasional yaitu:

1. Produk National Bruto (PNB) atau Gross National Income (GNP)

Dengan kata lain, PNB adalah total produk domestik bruto ditambah pendapatan bersih dari luar negeri, yaitu pendapatan warga negara yang bekerja di luar negeri dikurangi pendapatan warga negara lain yang bekerja di dalam negeri. PNB adalah jumlah barang dan jasa yang diproduksi oleh faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh warga negara baik di dalam negeri maupun di luar negeri, tetapi tidak termasuk warga negara asing yang tinggal di negara tersebut. Hal ini dapat dirumuskan sebagai berikut (Naf'an, 2014):

$$PNB = PDB + \text{pendapatan Neto dari luar negeri}$$

Dimana,

PNB = Produk Nasional Bruto/Gross National Product (GNP)

PDB = Produk Domestic Bruto/Gross Domestic Product

Pendapatan Neto = pendapatan dari warga negara yang tinggal di luar negeri dikurangi pendapatan warga negara asing yang bekerja di dalam negeri.

2. Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestic Product (GDP)

PDB adalah nilai total semua produk dan layanan yang dihasilkan oleh semua entitas ekonomi suatu negara, termasuk barang dan jasa yang diproduksi oleh warga negara asing yang bermukim di negara tersebut.

Penghitungan nilai PDB dapat dilakukan atas dua macam dasar harga yaitu:

Pertama, PDB atas dasar harga berlaku, merupakan PDB yang dihitung dengan dasar harga yang berlaku pada tahun tersebut. PDB atas dasar harga berlaku berfungsi untuk melihat dinamika/ perkembangan struktur ekonomi yang riil pada tahun tersebut,

Kedua, PDB atas dasar harga konstan, merupakan PDB yang dihitung dengan dasar harga yang berlaku pada tahun tertentu. PDB atas dasar harga konstan berfungsi untuk melihat pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun

3. Produk Nasional Neto (PNN) atau Nett National Product (NNP)

NNP adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu masyarakat dalam kurun waktu tertentu, biasanya satu tahun, termasuk barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara kelahiran luar (Daulay, 2019). Sering disebut sebagai Produk Nasional Neto berdasarkan harga pasar, yaitu PNB dikurangi penyusutan tahunan barang modal selama proses produksi. Persamaan matematikanya:

$$\text{NNP} = \text{GNP} - \text{Depresiasi}$$

4. Pendapatan Nasional (PN) atau National Incoy (NI atau NY)

Sering disebut Net National Product (NNP) dasar dari biaya faktor produksi atau pendapatan Nasional Neto atau Net National Income (NNI) adalah NNP yang sudah dikurangi pajak tidak langsung yang dipungut pemerintah, atau jika kita menghitung dari GNP dapat kita rumuskan (Naf'an, 2014):

$$\text{NNI} = \text{GNP} - \text{Depresiasi} - \text{Pajak tidak langsung}$$

5. Pendapatan Perseorangan (personal income)

Pendapatan yang diterima oleh setiap lapisan masyarakat dalam satu tahun. Pendapatan nasional tidak semuanya diterima oleh pemilik faktor produksi karena ada sebagian pendapatan yang tidak dibagikan antara lain: laba yang ditahan, pajak perseorangan, iuran jaminan sosial dan transfer payment/bantuan sosial.

Rumusan untuk menghitung PI adalah:

$$PI = NNI - (\text{laba ditahan} + \text{pajak perseorangan} + \text{iuran jaminan sosial} + \text{transfer payment})$$

6. Pendapatan Bersih Setelah Pajak (Disposable Income)

Adalah pendapatan pribadi atau perseorangan setelah dikurangi pajak langsung (pajak penghasilan). Hoarding merupakan kebocoran yang pada akhirnya akan mengakibatkan menurunnya pendapatan nasional.

Disposable income adalah personal income setelah dikurangi pajak langsung (misalnya pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor dan sebagainya). Disposable income merupakan pendapatan yang siap digunakan, baik untuk keperluan konsumsi maupun ditabung.

Rumusan untuk menghitung DI adalah:

$$DI = PI - \text{Pajak Langsung}$$

Tabungan yang disimpan di lembaga keuangan resmi (Bank) akan dapat menambah pendapatan nasional karena, saving ini akan dimanfaatkan untuk investasi, lewat investasi inilah pendapatan nasional dapat meningkat (Naf'an, 2014).

Pendapatan Nasional Perspektif Ekonomi Islam

Menurut teori ekonomi tradisional, PDB riil, atau PNB, dapat digunakan untuk mengukur kesejahteraan ekonomi suatu negara secara keseluruhan. Setelah dibagi dengan jumlah penduduk (PNB per kapita), orang-orang dianggap lebih sejahtera secara material ketika PNB meningkat atau sebaliknya. Ada kritik terhadap PNB sebagai ukuran kesejahteraan ekonomi, dengan beberapa pihak berpendapat bahwa PNB/kapita merupakan indikator kesejahteraan yang tidak dapat diandalkan. Tidak perlu dikatakan lagi bahwa kondisi seseorang tidak menjadi lebih buruk jika, misalnya, nilai output mereka menurun akibat mereka bekerja lebih sedikit jam atau menghabiskan lebih banyak waktu untuk bersantai.

Pada tahun 1972, Nordhaus dan Tobin dari Yale bersama-sama mengusulkan konsep MEW (Pengukuran Kesejahteraan Ekonomi). Sayangnya, ide ini tidak pernah mendapat perhatian, dan PDB/kapita riil masih sering digunakan sebagai proksi kesejahteraan suatu negara. (Huda, 2008).

Dengan cara apa ekonomi Islam mengkritik perhitungan PDB/kapita riil, yang merupakan ukuran kesejahteraan suatu negara? Penerapan parameter falah merupakan salah satu ciri yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya. Kesejahteraan sejati, atau falah, terjadi ketika unsur-unsur spiritual dimasukkan ke dalam maknanya. Dalam pengertian sistem ekonomi (nidhom al-iqtishad), ekonomi Islam merupakan sistem yang dapat membimbing manusia menuju kesejahteraan sejati (falah).

Memang benar bahwa tujuan semua sistem ekonomi, baik yang telah punah dan terkubur di masa lalu maupun yang sedang berada di puncak kekuasaannya saat ini, adalah untuk memberikan kesejahteraan kepada para pendukungnya. Peningkatan PDB yang tinggi, yang jika dibagi dengan jumlah penduduk, menghasilkan pendapatan per kapita yang tinggi, lebih sering menjadi sarana pemenuhan kesejahteraan ini. Kapitalis modern akan menerima jumlah terbesar jika itu adalah satu-satunya kriteria. Namun, ada faktor penting lain yang berkontribusi terhadap kesejahteraan selain pendapatan per kapita yang tinggi. Itu bukanlah syarat yang cukup dalam masalah kesejahteraan; sebaliknya, itu merupakan syarat yang perlu. Dalam konteks Islam, al-falah merujuk pada pandangan Islam tentang manusia secara umum. Islam berpendapat bahwa spiritualitas seseorang adalah yang membentuk dirinya. Karena ruh merupakan hakikat manusia, maka semua kegiatan duniawi, termasuk kegiatan ekonomi, difokuskan pada pemenuhan kebutuhan rohani dan jasmani. (Huda, 2008).

Oleh karena itu, perhitungan pendapatan nasional berdasarkan Islam harus mampu mengenali bagaimana interaksi instrumen wakaf, zakat, dan sedekah dalam meningkatkan kesejahteraan umat di samping harus memasukkan unsur falah dalam analisis kesejahteraan.

Secara fundamental, ekonomi Islam harus mampu menawarkan metode untuk mengukur kesejahteraan sosial dan ekonomi sesuai dengan kerangka moral dan sosial Islam. Metode pendapatan nasional yang berbasis pada ekonomi Islam harus mampu mengukur setidaknya empat hal agar dapat memberikan gambaran yang lebih objektif dan jelas tentang tingkat kesejahteraan. Empat hal tersebut adalah (Huda, 2008):

1. Pendapatan Nasional Harus Dapat Mengukur Penyebaran Pendapatan Individu Rumah Tangga

Komposisi dan distribusi output per kapita yang sebenarnya tidak dapat dijelaskan oleh PNB, meskipun PNB diklaim dapat mengukur efektivitas kegiatan ekonomi yang terjadi di pasar. Karena di sinilah nilai-nilai sosial dan ekonomi Islam dapat dipadukan, perhitungan pendapatan nasional Islam harus dapat memperhitungkan distribusi alami output per kapita. Penentuan distribusi pendapatan individu secara akurat di seluruh negeri akan memudahkan identifikasi jumlah orang yang masih berada di bawah garis kemiskinan.

Ini menjelaskan mengapa ada banyak ketidakpuasan ketika pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat miskin karena daftar mereka yang benar-benar diklasifikasikan sebagai orang miskin adalah salah. Angka-angka GNP tidak dapat digunakan untuk menentukan jumlah

orang yang hidup dalam kemiskinan, karena perhitungan BPS didasarkan pada survei-survei yang tidak secara akurat mencerminkan kenyataan (Huda, 2008).

Dengan cara yang sama, kegiatan produksi yang tidak dipertukarkan di pasar tidak dapat diidentifikasi oleh GNP. Hal ini menyiratkan bahwa GNP tidak mencakup kegiatan produksi keluarga yang langsung dikonsumsi dan tidak masuk ke pasar. Kesejahteraan individu secara signifikan dipengaruhi oleh kenyataan ini. Pada kenyataannya, survei nasional yang menyeluruh dapat menghasilkan angka ini. Tentu saja, angka pendapatan per kapita yang diperoleh dari survei semacam itu akan lebih tinggi dari GNP per kapita.

2. Pendapatan Nasional Harus Dapat Mengukur Produksi di Sektor Pedesaan

Meskipun diakui bahwa mengukur output komoditas subsistem secara tepat adalah hal yang sulit, tetap saja perlu untuk mencapai konsensus untuk memasukkan statistik produksi komoditas subsistem ke dalam perhitungan GNP. Paling tidak, pendapatan nasional harus dihitung dengan menggunakan perkiraan kasar dari output subsisten. Di negara-negara Muslim yang baru saja bergabung dengan pasar global, barang-barang subsisten ini-pangan khususnya-sangat penting.

Tingkat harga yang digunakan harus diketahui sebelum tingkat produksi komoditas subsisten ini dapat dihitung. Biasanya ada dua set harga pasar: nilai yang dibayar konsumen di pasar eceran dan harga yang sebenarnya diterima atau diantisipasi oleh petani. Secara umum, peningkatan produksi pertanian pedesaan berhubungan dengan penurunan harga produk pangan konsumen di pinggiran kota, atau, secara bersamaan, peningkatan jumlah tengkulak yang bertindak sebagai jembatan antara petani dan konsumen. Karena sektor subsisten merupakan fondasi distribusi pendapatan dan sumber mata pencaharian bagi banyak orang, jelas bahwa kegagalan untuk mendeteksi pendapatan dari sektor ini secara efektif merupakan kerentanan yang perlu diatasi (Huda, 2008).

3. Pendapatan Nasional Harus Dapat Mengukur Kesejahteraan ekonomi Islam

Seperti yang telah kita lihat, angka rata-rata per kapita tidak memberikan data yang cukup untuk mengukur kesejahteraan yang sebenarnya. Mengekspresikan kebutuhan mendasar atau kebutuhan efektif akan barang dan jasa sebagai persentase dari keseluruhan konsumsi sangatlah penting. Hal ini diperlukan karena kemampuan suatu negara atau bangsa untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, perawatan kesehatan, pendidikan, air bersih, rekreasi, dan layanan publik lainnya dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemakmurannya.

4. Penghitungan Pendapatan Nasional Sebagai Ukuran dari Kesejahteraan Sosial Islami Melalui Pendugaan Nilai Santunan Antar saudara dan Sedekah

Kami menyadari bahwa GNP adalah indikator moneter yang tidak termasuk pembayaran untuk transfer seperti sedekah. Namun, kita harus mengakui pentingnya sedekah dalam masyarakat Islam. Selain itu, sedekah merupakan komponen dari ketaatan beragama serta pemberian tanpa pamrih kepada orang lain. Mendukung anggota keluarga yang sedang berjuang secara finansial sangat diharapkan dalam masyarakat Islam. Mengukur nilai pergerakan dana jenis ini dapat memberikan informasi yang berharga untuk menyelidiki fungsi sistem jaminan sosial Islam, meskipun faktanya sulit untuk mendapatkan datanya.

Kuantitas dan variasi tindakan dan transaksi yang dimotivasi oleh keinginan untuk melakukan perbuatan baik lebih signifikan di beberapa negara Muslim daripada di Barat. Keluarga dan suku-suku terlibat dalam berbagai macam usaha ekonomi, dan ada juga berbagai bentuk tanggung jawab filantropis di antara anggota keluarga. Kadang-kadang hanya berupa pemberian produk atau jasa yang sederhana, sehingga tidak semuanya membutuhkan pengeluaran keuangan yang signifikan. Ada pula yang tidak berhubungan dengan uang dan jasa, seperti sumbangan untuk kegiatan di desa, upah imam masjid, dan pemeliharaan masjid. (Huda, 2008).

D Jauh lebih mudah untuk memperkirakan zakat, salah satu tanggung jawab pembayaran transfer yang paling signifikan di negara-negara Muslim, daripada sedekah yang sering diberikan oleh umat Islam kepada mereka yang kurang beruntung. Pendapatan dari zakat saat ini diukur sebagai persentase dari GNP. Sebagai bagian dari strategi untuk mengurangi kemiskinan, pengukuran ini akan menjadi variabel kebijakan yang sangat membantu dalam pengambilan keputusan sosial dan ekonomi. Penggunaan zakat untuk memerangi kemiskinan di negara-negara Muslim saat ini menjadi prioritas bagi banyak negara.

Berikut beberapa sumber pendapatan negara dalam perspektif Ekonomi Islam (Asyari Hasan, 2023):

1) Ghanimah

Kata "ghanama," yang diterjemahkan menjadi "rampasan perang," adalah akar dari kata "ghanimah." Perang dengan kaum musyrik di daerah lain menghasilkan kekayaan, yang meliputi harta tak bergerak dan harta bergerak, seperti persenjataan, perhiasan, tanah, dan unta. Sisanya dikumpulkan di Baitul Mal untuk didistribusikan, sementara seperlima diberikan kepada Allah dan Rasul-Nya, para sahabat Rasul, orang-orang miskin, anak-anak yatim, dan Ibnu Sabil.

2) Zakat

Zakat memiliki tiga makna etimologis. Pertama, berkah; kedua, pengembangan, pertumbuhan, kesuburan, atau perluasan. Ketiga, tazkiyah pemurnian dan pembersihan. Dalam terminologi syariat, zakat mengacu pada pengambilan tertentu yang diberikan kepada kelompok tertentu. (Muhammad, 2019).

3) Sedekah

Kata "shadaqa," yang berarti benar, adalah akar dari sedekah. Bentuk sedekah adalah barang yang dikorbankan. Sedekah, menurut Ibnu Taimiyah, adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atas tanahnya (Jauhari, 2011). Menurut al-Sya'rani, sedekah adalah sesuatu yang ma'ruf. Hal ini sejalan dengan hadis Muslim, "kullu ma'rufin shadaqatun," yang menyatakan bahwa semua tindakan kebaikan, termasuk menghindari dosa, menafkahi keluarga, dan tersenyum, adalah sedekah.

4) Infaq

Kata "infaq" berasal dari kata "anfaqa," yang berarti mengeluarkan atau mendistribusikan uang untuk tujuan-tujuan tertentu (Azzam dan Hawwas 2013). Menurut ajaran Islam, infak juga dapat berarti menggunakan sebagian harta untuk kepentingan (Hafidhudin 1998). Karena infak tidak dibatasi oleh nishab, asnaf, atau subjek, infak dapat diperoleh dari dan diberikan kepada siapa saja.

5) Ushr

Ushr (jamak: 'usyur') adalah bahasa Arab yang berarti sepersepuluh. Dalam budaya Arab, "ushr" mengacu pada biaya sepersepuluh dari aset yang diperdagangkan ketika melintasi perbatasan suatu negara. Akibatnya, "ushr" sebanding dengan bea cukai modern. Sebagai contoh, ketika sebuah kafilah dagang memasuki sebuah wilayah, mereka diharuskan memberikan sepersepuluh dari barang dagangannya kepada raja setempat sebagai imbalan atas fasilitas keuangan, sewa, dan keamanan. Ini termasuk pengangkutan ternak dan sumber air. (Dzikra, 2023).

6) Jizyah

Jizyah berasal dari jaza' yang bermakna sejumlah harta yang dibayarkan Ahlul Kitab yang mengikat perjanjian dengan muslimin. Islam telah menetapkan jizyah bagi *ahlu dzimma* sebagai pengganti kewajiban zakat yang diambil dari muslimin. Dengan pemberlakuan jizyah ini, kedua kaum yang hidup berdampingan menjadi sama. Kaum muslimin dan *ahlu dzimma* berada dibawah naungan satu bendera, sama-sama memiliki hak yang diakui, dan sama-sama berhak atas fasilitas pemerintah. Oleh karena inilah, Allah mewahibkan pemungutan jizyah (dari kaum *ahlu dzimma*) yang diberikan kepada muslimin sebagai balasan bagi muslimin yang telah membela mereka dan menjaga negara islam yang sama-sama mereka tempati. Setelah membayar jizyah, *ahlu dzimma* wajib dijaga

keamanan dan ketentraman mereka, termasuk menghadapi mereka yang berniat jahat terhadap para *ahlu dzimmah* (Sabiq, 2018).

7) Kharaj

Di negara-negara Islam, pemilik tanah non-Muslim dikenakan pajak tanah yang dikenal sebagai kharaj. Sebagai contoh, kharaj dikenakan kepada pemilik tanah non-Muslim di Mesir dan Irak pada masa Nabi Muhammad SAW sebagai semacam uang sewa untuk tanah yang mereka gunakan. Jalan dan saluran irigasi adalah salah satu proyek infrastruktur publik yang dibiayai oleh kharaj. Kharaj tidak lagi digunakan di beberapa negara Islam kontemporer. Sebagai contoh, kharaj dilarang di Turki pada tahun 1800-an. (Arifin, 2023).

8) Pajak Pertambangan

Pajak pertambangan atas sumber daya yang ditemukan di negara-negara Islam, seperti emas, perak, besi, dll. Negara ditugaskan untuk menegakkan keadilan dengan seperlima dari kekayaan negara. Namun dalam hal pajak, para ulama memiliki pendapat yang berbeda.

9) Wakaf

Secara bahasa, wakaf berasal dari kata *waqafa*, yang berarti al-man'u (menahan) dan *habasa* (menahan). Wakaf didefinisikan sebagai perbuatan hukum seseorang, kelompok orang, atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan syariah dalam Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam. Sementara itu, perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah dirumuskan dalam pasal 1 undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. (Rozalinda, 2019).

Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional

Salah satu indikator yang disukai untuk menilai keadaan suatu negara adalah pendapatan nasionalnya. Elemen-elemen yang memengaruhi pendapatan, seperti penawaran dan permintaan secara keseluruhan, tabungan dan konsumsi, dan investasi.

1) Permintaan dan penawaran agregat

Hubungan antara total permintaan untuk produk dan layanan pada titik harga tertentu ditunjukkan oleh permintaan agregat. Sementara penawaran agregat menggambarkan hubungan antara jumlah keseluruhan produk dan layanan yang ditawarkan oleh perusahaan pada tingkat harga tertentu, permintaan agregat adalah daftar semua barang dan jasa yang akan dibeli oleh berbagai sektor ekonomi pada titik

harga yang berbeda. Salah satu elemen yang memengaruhi pendapatan nasional adalah konsumsi. Tingkat harga, tingkat pengangguran, dan tingkat aktivitas ekonomi secara umum akan berfluktuasi sebagai respons terhadap pergeseran permintaan atau penawaran agregat. Tingkat harga dan output nasional (pendapatan nasional) biasanya naik sebagai respons terhadap peningkatan permintaan agregat, yang menurunkan tingkat pengangguran. Harga sering kali naik karena kuantitas penawaran agregat menurun, meskipun pengangguran dan output nasional (atau pendapatan) juga akan naik. (Naf'an, 2014).

2) Konsumsi dan Tabungan

Tabungan adalah bagian dari pendapatan yang tidak digunakan untuk konsumsi, sedangkan konsumsi adalah jumlah total yang dibelanjakan dalam perekonomian selama periode waktu tertentu (biasanya setahun) untuk membeli barang dan jasa. Pendapatan, tabungan, dan konsumsi saling terkait. Hal ini terbukti dari teori konsumsi psikologis Keynes, yang meneliti bagaimana orang berperilaku ketika mereka mengkonsumsi dalam kaitannya dengan pendapatan mereka. (Naf'an, 2014).

3) Investasi

Investasi, sering dikenal sebagai penanaman modal, dimana uang yang dibelanjakan oleh perusahaan untuk membeli peralatan produksi dan barang modal dalam rangka memperluas kemampuan mereka untuk menawarkan barang dan jasa. Investasi akan meningkat jika lebih banyak barang dan jasa diciptakan. Di sisi lain, investasi akan berkurang jika lebih sedikit barang dan jasa yang diciptakan. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu faktor penentu utama pendapatan nasional adalah investasi. Aliran investasi akan mengikuti perubahan dalam perekonomian dengan tepat, menurut Teori Keynes. Sebagai hasil dari investasi, masyarakat terus mengalami peningkatan aktivitas ekonomi dan pembukaan lapangan kerja, yang meningkatkan pendapatan nasional dan standar hidup masyarakat. (Asyari Hasan, 2023).

SIMPULAN

Salah satu metrik utama untuk menilai kesehatan ekonomi suatu negara adalah pendapatan nasionalnya. Gagasan ini mencakup sejumlah metode, seperti pendapatan pribadi dan pendapatan bersih setelah pajak, serta Produk Domestik Bruto (PDB), Produk Nasional Bruto (PNB), dan Produk Nasional Neto (PNN). Meskipun PDB dan GNP memiliki keterbatasan dalam menangkap kesejahteraan yang sebenarnya secara akurat, namun keduanya sering digunakan dalam sistem ekonomi konvensional sebagai indikator kesejahteraan ekonomi suatu negara. Ekonomi Islam memberikan metode alternatif untuk

menghitung kesejahteraan dengan memperhitungkan faktor-faktor sosial dan moral yang berpusat pada gagasan falah, atau bentuk kesejahteraan tertinggi yang menggabungkan unsur-unsur spiritual. Zakat, infak, sedekah, wakaf, dan sumber pendapatan lainnya merupakan alat penting dalam sistem ini untuk mengalokasikan kekayaan dan meningkatkan kesejahteraan individu. Dari sudut pandang ekonomi Islam, alat-alat ini menjadi komponen penting dalam menentukan pendapatan nasional karena dapat mengidentifikasi distribusi pendapatan yang lebih adil. Selain itu, pendapatan nasional dalam ekonomi Islam memberikan cara yang lebih menyeluruh untuk mengukur kesejahteraan masyarakat, menyoroti pentingnya keadilan sosial dan menyeimbangkan antara aspek material dan spiritual dalam kehidupan ekonomi. Oleh karena itu, untuk mencapai kesejahteraan yang menyeluruh, pendapatan nasional harus dihitung dengan menggunakan perangkat ekonomi dan sosial yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Zainal et.al., 2023. *Sejarah dan Pemikiran Ekonomi Islam*. Banten: PT Sada Kurnia Pustaka.
- Azwar, A. (2016). Peran Alokatif Pemerintah melalui Pengadaan Barang/Jasa dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Indonesia. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 20(2), 149–167. <https://doi.org/10.31685/kek.v20i2.186>
- Badan Kebijakan Fiskal. (2021, August 25). Keuangan Syariah Sangat Berperan dalam Pemulihan Ekonomi Nasional. *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/baca/2021/08/25/4308-keuangan-syariah-sangat-berperan-dalam-pemulihan-ekonomi-nasional>
- Ben Jedidia, K., & Guerbouj, K. (2021). Effects of zakat on the economic growth in selected Islamic countries: empirical evidence. *International Journal of Development Issues*, 20(1), 126–142. <https://doi.org/10.1108/IJDI-05-2020-0100>
- Daulay, Aqwa Naser et.al., 2019. *Ekonomi Makro Islam*. Medan: FEBI UIIn-SU Press
- Dzikra, Moh Nur Afdhal. (2023). Penerapan Ushr Pada Masa Khulafarrasyidin dan Perbedaannya dengan Bea Cukai di Indonesia, *Journal of College Students Intellectual*, Volume 1., No. 1., hlm. 18
- Hasan, A. (2023). Pendapatan Nasional dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Dan Keuangan Syariah*, 4(2).
- Huda, Nurul et.al., 2008. *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoretis*. Jakarta: Pustaka Media Group

- Inayati, A. A. (2013). Pemikiran Ekonomi Islam M. Umer Chapra. *Profetika, Jurnal Studi Islam*, 14(2), 164–176. <https://journals.ums.ac.id/index.php/profetika/article/download/2015/1433>
- Jawad, A., & Christian, K. (2019). Islamic Banking and Economic Growth: Applying the Conventional Hypothesis. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 5(1), 37–62. <https://doi.org/10.21098/jimf.v5i1.1047>
- Muhamad. (2019). *Sistem Keuangan Islam: Prinsip dan Operasionalnya di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers
- Naf'an. (2014). *Ekonomi Makro Tinjauan Ekonomi Syariah*. Graha Ilmu.
- Purnamasari, B. (2024). Instrumen Pendapatan Nasional dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Tawiq: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1).
- Rozalinda. (2019). *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Depok: Rajawali Pers
- Sabiq, Sayyid. (2018). *Fiqh Sunnah Jilid IV*, penerjemah: Abu Aulia dan Abu Syauqina, Jakarta: PT Pustaka Abdi Bangsa
- Virsa, D. A., Jasman, D., Mahendra, I., & Hidayat, F. (2024). Pendapatan Perkapita dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Al-Amar(JAA)*, 5(2), 199–208. <https://ojs-steialamar.org/index.php/JAA/article/view/191/145>
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. <https://books.google.co.id/books?id=zG9sDAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>